



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti membaca beberapa penelitian terdahulu untuk bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuat penelitian ini. Penelitian terdahulu ini berisikan tentang landasan teori, hasil penelitian, konsep, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu ini akan membantu penulis untuk mendapatkan segala macam informasi terkait penelitian yang sedang dijalankan.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Chotimah dan Ade Irma dari Universitas Syiah Kuala. Pada penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SBI) pada Siaran Berita TVRI” membahas secara tuntas mengenai para penyandang tunarungu yang ada di Kota Banda Aceh. Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sementara pada penelitian terdahulu yang kedua, dengan judul skripsi Penerimaan Khalayak Tentang Bias Gender

Perempuan Ber-Traveling pada Tayangan Para Petualang Cantik di Trans7 yang ditulis oleh Pernita Hestin Untari, mahasiswi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada penelitian ini, beliau meneliti mengenai bagaimana tanggapan mengenai sebuah acara yang ada pada sebuah stasiun televisi Indonesia, yang disangkut pautkan dengan *feminism*. Hampir secara keseluruhan metode penelitiannya sama dengan penulis. Berikut adalah informasi singkat mengenai jurnal dan skripsi terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Siti Nur Chotimah dan Ade Irma	Pernita Hestin Untari	Margaretha Aprilia Sembiring
Judul	Efektifitas Penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SBI) pada Siaran Berita TVRI	Penerimaan Khalayak Tentang Bias Gender Perempuan Ber- Traveling pada Tayangan Para Petualang Cantik di Trans7	Penyampaian Pemberitaan Pemilu Pilpres 2019 iNews Siang oleh Interpreter (Juru Bicara Bahasa Isyarat): Studi Kasus Khalayak Tunarungu
Tujuan	Untuk	1. Mengetahui	1. Untuk

<p>Penelitian</p>	<p>mengetahui efektifitas penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) pada siaran berita TVRI Nasional terhadap penyandang tunarungu di Kota Banda Aceh.</p>	<p>penerimaan makna mengenai bias gender perempuan ber-traveling pada tayangan Para Petualang Cantik di Trans7 oleh khalayak.</p> <p>2. Mengetahui posisi penonton dalam menanggapi bias gender perempuan ber-traveling pada tayangan Para Petualang</p>	<p>mengetahui bagaimana penerimaan makna oleh khalayak tunarungu dari berita politik yang ditayangkan oleh iNews Siang.</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana posisi khalayak tunarungu dalam menanggapi berita politik yang</p>
--------------------------	--	--	---

		<p>Cantik di Trans7.</p> <p>3. Mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan adanya perbedaan penerimaan terkait dengan bias gender dalam program Para Petualang Cantik di Trans7.</p>	<p>ditayangkan oleh iNews Siang.</p> <p>3. Untuk mengetahui apakah interpreter pada berita yang ditayangkan mampu menyampaikan isi berita dengan benar atau tidak.</p>
Konsep&Teori	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p><i>Uses and Gratification</i></p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p><i>Coding-Encoding</i></p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p><i>Coding-Encoding</i></p>

Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Analisis Resepsi	Analisis Resepsi
Pengumpulan Data	Wawancara Observasi Studi dokumentasi	Observasi Indepth Interview	Observasi Indepth Interview
Hasil Penelitian	Benar bahwa khalayak penyandang tunarungu yang aktif menonton siaran berita TVRI Nasional memang memiliki tujuan untuk menonton dan melihat berita untuk memenuhi kebutuhan	Adapun beberapa hasil yang telah diamati oleh peneliti, terdapat sikap sportif, melihat penampilan, dan membandingkan dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan individu. Kemudian, ekspetasi sportif, sportif namun terbatas, dan tidak sportif terhadap perempuan	

	informasinya	<p>ber-<i>traveling</i></p> <p>dipengaruhi oleh latar belakang gender, lingkungan, dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah posisi penonton yang terbagi dalam tiga kategori dominan yaitu penonton yang sportif terhadap tayangan, kemudian sportif namun ada batasan-batasan yaitu Negosiasi, dan yang terakhir adalah oposisi dimana penonton tidak sportif dan membandingkan tayangan.</p>	
--	--------------	--	--

2.2 TEORI ATAU KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN

2.2.1 *ANALISIS RESEPSI*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep analisis resepsi untuk kelancaran penelitian. Konsep analisis resepsi secara khusus mempelajari sebuah kultur atau tradisi yang saling berhubungan antara ilmu komunikasi dengan kemanusiaan (McQuail, 1997, p. 18). Pada kasus penelitian ini, penulis akan menghubungkannya dengan isu yang tengah dihadapi oleh khalayak tunarungu. Menurut McQuail (1997), studi analisis resepsi ini akan memberikan perhatian lebih kepada media yang digunakan oleh khalayak, dan bagaimana pesan yang hendak disampaikan oleh media tersebut ditangkap oleh khalayak. Pesan yang mau diterima ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang nantinya akan mempengaruhi perilaku khalayak terhadap pesan yang disampaikan oleh media. Metode resepsi analisis ini sangat efektif untuk mendalami sifat dan perilaku khalayak pada zaman modern, sebab begitu banyak gaya berpikir orang-orang, dan interpretasi orang-orang terhadap sesuatu pastilah berbeda-beda (McQuail, 1997, p. 19).

Menurut Morley (dalam McQuail, 1997, p. 19), usaha yang dilakukan untuk menginterpretasi sebuah informasi itu datang dari sebuah pertunjukan atau siaran yang memiliki pesan yang beragam dan bisa dibaca atau ditelusuri yang sifatnya sosial dan memiliki kultur baik secara grup atau individu. Liebes & Katz

(dalam McQuail, 1997, p. 19) juga menambahkan bahwa hampir kebanyakan siaran-siaran pada setiap media memiliki pesan yang polisemik (memiliki pesan lebih dari satu) dan cukup terbuka dan memiliki kemungkinan besar untuk memiliki interpretasi yang beragam. Fenomena ini tentunya juga terjadi kepada khalayak tunarungu, ditambah lagi ada kemungkinan masalah interpretasi terjadi pada interpreternya. Oleh karena itu, penulis akan secara fokus meneliti tentang bagaimana khalayak tunarungu yang mendapatkan pesan dan menginterpretasikan pesan yang didapatkan.

Morley, Seiter, Borchertz, Kreutzner & Warth (dalam Mcquail, 1997, p. 19) juga mengutarakan bahwasanya media yang memiliki pesan pada siaran yang diberikan itu bisa memiliki begitu banyak arti dan interpretasi, hal-hal tersebut melingkupi:

1. Teks media seharusnya bisa dibaca melalui persepsi dari khalayaknya, tergantung dari siaran atau teks media apa yang dilihat.
2. Proses dari penggunaan media dimulai dari media yang menarik perhatian khalayaknya.
3. Penggunaan media memiliki contoh situasi spesifik yang tipikal dan berorientasi terhadap sebuah grup yang dibahas.
4. Khalayak biasanya selalu membandingkan sebuah media dengan media lain.

5. Khalayak itu tidak pernah pasif, mengingat jika mereka memiliki kelompok tertentu, jadi jika mereka mendapatkan sebuah pesan, biasanya mereka akan membahasnya bersama

Pada hakikatnya, tujuan utama dari analisis resepsi adalah untuk meneliti pengalaman yang didapatkan oleh khalayaknya (McQuail, 1997, p. 20).

2.2.2 PEMILU PADA MEDIA MASSA

Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang menjadi jati diri kita, jati diri tersebut tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin, 2011, p. 268). Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, tak heran apabila sistem ketatanegaraan yang secara demokratis sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia, dan pemilu merupakan salah satu bentuk dari sebuah demokrasi (detikNews, 2017, para. 2). Ranadireksa (2007) berpendapat bahwa demokrasi adalah pluralitas, yang artinya negara harus bisa menjamin kebebasan dalam menyatakan pendapat. Oleh karena itu, pemilu sudah menjadi bagian penting bagi sejarah masyarakat Indonesia dan pemilu pastilah selalu melibatkan masyarakat sebagai pemegang kendali atas siapa yang akan menjadi pemimpin mereka selama 5 tahun ke depan, sebab suara ada di tangan mereka.

Menurut Arifin (2011), konsep kedaulatan rakyat yang timbul di kalangan pemimpin pergerakan kemerdekaan pada masa lalu sejalan dengan cita-cita negara hukum yang berakar dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Rekam jejak pemilu di Indonesia pertama kali dimulai sejak tahun 1955 pada masa kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno (kompas.com, 2018, para. 2). Pada saat itu, pemilu yang dilaksanakan pada 29 September 1955 tersebut dilakukan guna untuk memilih keanggotaan DPR dan Konstituante (kompas.com, 2018, para. 3). Kemudian pemilu kedua dilaksanakan pada Orde Baru, tepatnya pada 5 Juli 1971 (kompas.com, 2018, para. 7) dan pemilu aktif dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hingga pada 1999, pemilu pertama setelah rezim Orde Baru berganti pun akhirnya dilakukan (kompas.com, 2018, para. 26). Sejak saat itu hingga sekarang, setiap lima tahun sekali, pemilu tetap selalu aktif dilakukan guna untuk melakukan pemilihan terhadap pemerintah di Indonesia.

Berbicara mengenai etika jurnalistik, khususnya dalam hal pemberitaan, Iskandar (2015) berpendapat bahwa hal tersebut masih harus diperdebatkan, khususnya masalah mengenai keberpihakan terhadap kandidat tertentu dalam pertarungan politik. Menurut McQuail (2011), media dapat menjadi kekuatan potensial untuk pencerahan publik, meningkatkan dan meneruskan institusi baru dari sekolah universal, perpustakaan publik, dan pendidikan populer. Tugas demokratis pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat baru yang

telah diberdayakan sangat diakui (McQuail, 2011, p. 59). McQuail (2011) juga menambahkan bahwa meski dengan pengaruh media yang mengganggu, setiap media massa baru selalu dipuji karena kegunaannya di bidang pendidikan dan budaya.

Ciri yang paling utama dari media massa adalah bahwa mereka dirancang untuk menjangkau banyak orang (McQuail, 2011, p. 61). McQuail (2011) juga menjelaskan bahwa audiens atau khalayak dianggap sebagai sebuah kumpulan dalam skala besar yang anonim, dan hubungan antara pengirim dan penerima dipengaruhi oleh media massa. Hubungan yang tidak bisa dihindari tersebut karena merupakan komunikasi yang bersifat satu arah, satu sisi, dan tidak personal serta terdapat jarak sosial dan fisik antarpengirim dan penerima (McQuail, 2011, p. 61). Menurut McQuail (2011), pengirim biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar, kehormatan, atau keahlian daripada si penerima pesan, dan juga hubungan ini tidak hanya tentang siapa yang lebih memiliki informasi lebih banyak (asimetris), melainkan tujuannya sudah diperhitungkan dan manipulatif. Mengapa dikatakan manipulatif? Karena biasanya komunikasi yang dilakukan ini tidak memiliki standar moral, komunikasi tersebut berjalan berdasarkan layanan yang dijanjikan atau diminta untuk beberapa kontrak tidak tertulis dengan tanpa kewajiban timbal balik (McQuail, 2011, p. 61).

Kepentingan publik merupakan hal yang harus diutamakan ketika sedang berhadapan dengan media massa. Menurut McQuail (2011), gagasan mengenai

kepentingan publik memiliki akar sejarah dalam mengidentifikasi masalah-masalah ini yang memerlukan beberapa *control public* secara kolektif dan arah bagi kebaikan masyarakat dan negara, sebagai contoh misalnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran air, peraturan mengenai berat, ukuran, dan mata uang, dan lain sebagainya. Jika mau diterapkan kepada media massa, makna sederhananya adalah bahwa media mengemban tugas penting dan utama dalam masyarakat dan sudah menjadi tugas utama mereka untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik (McQuail, 2011, p. 180).

Menurut McQuail (2011), kesulitan dalam menangani konsep kepentingan publik selalu berkaitan dengan signifikansinya yang tinggi. Blumler (dalam McQuail 1998, p. 54) membuat sebanyak tiga poin kunci, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan media sama seperti pemerintah, harus digunakan dengan cara yang sah dan tidak jauh dari gagasan mengenai tanggung jawab.
2. Kualitas hebat tertentu terlekat pada gagasan mengenai kepentingan publik.
3. Gagasan mengenai kepentingan publik harus bekerja dalam dunia yang tidak sempurna dan tidak murni.

Terlepas dari teori yang tertulis terkait praktik politik, hukum, dan peraturan lainnya, untuk menilai banyaknya kasus dan menentukan 'kepentingan publik' itu adalah dengan melalui konten (McQuail, 2011, p. 182). Konten-

konten itu seperti, (a) keberagaman informasi, opini, dan budaya, (b) mendukung tatanan publik dan hukum, (c) informasi dan budaya yang berkualitas tinggi, (d) mendukung sistem politik demokratis (ranah publik), (e) menghormati kewajiban internasional dan Hak Asasi Manusia, dan (f) menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan individu (McQuail, 2011, p. 182).

2.2.3 KHALAYAK PENYANDANG TUNARUNGU PADA PEMILU

Pendataan survei pada UU No. 8 tentang Penyandang Disabilitas telah berhasil dibuat oleh Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 lalu (Solider, 2018, para. 5). Persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar adalah 0.09 persen yang tidak bisa mendengar sama sekali, 0,57 persen yang mengalami kesulitan saat mendengar, dan 2, 69 persen yang mengalami sedikit kesulitan mendengar (Solider, 2018, para. 24). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh masyarakat tetap harus bisa mendapatkan informasi, meski dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, sebab pada undang-undang penyiaran sudah jelas tertulis. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada undang-undang tersebut, tertulis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) BAB XI terkait Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu Pasal 15, terdapat sebanyak dua poin penting, yaitu:

(1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:

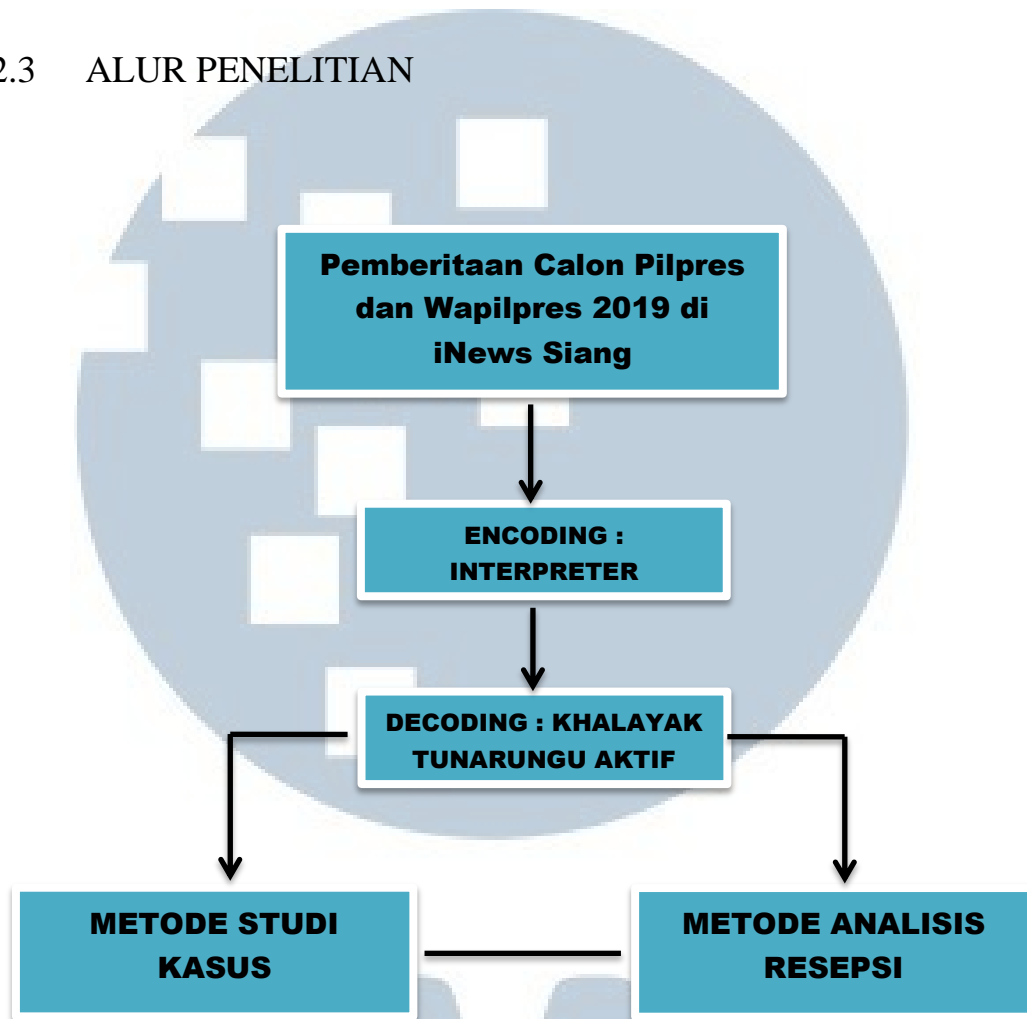
- a. orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal;
- b. orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;
- c. orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu;
- d. orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental;
- e. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau
- f. orang dengan masalah kejiwaan

(2) Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Demokrasi membutuhkan iklim yang terbuka atau transparan. Oleh karena itu, rakyat perlu dan berhak untuk tahu sebanyak mungkin tentang apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat yang dipercayakan oleh masyarakat (Ranadirekta, 2007. P. 186). Dengan begitu, seluruh stasiun televisi haruslah menyiapkan interpreter (penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa isyarat) untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang berkebutuhan khusus tersebut. Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) juga menuliskan terkait prinsip-prinsip jurnalistik yang harus ada pada siaran yang ditayangkan. Hal tersebut terdapat di BAB XVIII Prinsip-Prinsip Jurnalistik Bagian Pertama, Umum, Pasal 22 poin (1), yaitu lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.



2.3 ALUR PENELITIAN



U M N
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA